



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROHMANU TAUFIQ
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM
3. NHK : 769003

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 475.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 512 m²/150 m² di KAB / KOTA BOJONEGORO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 962 m² di KAB / KOTA TUBAN, HADIAH Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 2850 m² di KAB / KOTA TUBAN, HADIAH Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 122.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA G MPV G Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MX KING 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BJ8 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 105.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 13.830.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 715.830.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 715.830.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.